



PHRI Tolak Wacana Lockdown

Sambungan dari hal 1

Hal ini sebagai peringatan keras untuk menjalankan proses secara serempak dan sungguh-sungguh.

"Wacana *lockdown* Ngarso Dalem adalah *warning* keras bagi kita. Hanya proses yang bisa dilakukan untuk menghentikan sebaran Covid-19," katanya.

Menurut ketua Harian Satgas Penanganan Covid-19 Kota Jogja ini, opsi *lockdown* bisa dilakukan jika kasus terus meningkat dan kapasitas rumah sakit sudah semakin tidak mencukupi. "Sebab, rasa-rasanya semua sudah kita lakukan," ujarnya.

Upaya yang sudah dilakukan untuk pengendalian kasus itu seperti sosialisasi dan penindakan agar masyarakat menjalankan proses. PPKM mikro untuk membatasi interaksi warga dan pembatasan aktivitas. Upaya-upaya agar kerumunan warga tidak terjadi di tempat layanan umum atau destinasi wisata dan upaya lainnya sudah dilakukan.

"Tetapi jika hasilnya masih tidak optimal, kasus masih terus berkembang dan pelaksanaan proses masih diabaikan, maka wacana *lockdown* bisa menjadi *warning* keras bagi kita semua, agar ada perubahan untuk mengurangi peningkatan sebaran Covid-19," tandasnya.

Menurutnya, proses Covid-19 mutlak harus dilakukan oleh siapa pun di manapun dan kapan pun. Diperlukan kesadaran dan kesungguhan masal untuk melaksanakan hal tersebut.

Mantan wartawan ini mencatat *bed occupancy rate* (BOR) di Kota Jogja sampai saat ini



ELANG KHARISMA DINAWAGATRAJOGJA

PEMBATASAN WISATAWAN: Wisatawan mengunjungi rumah makan pinggir pantai di Pantai Depok, Bantul, kemarin (20/6).

meski sudah cukup mengkhawatirkan, masih tercukupi. Keterpakaian kapasitas kamar ICU sudah mencapai 85 persen, kamar isolasi 69 persen, dan shelter Rusunawa Bener 84 persen, serta masih memperbaiki 12 kamar shelter yang rusak.

"Jogja sebagai ibukota provinsi yang banyak rumah sakitnya menjadi rujukan dari kota-kota lainnya, maka otomatis akan menanggung lonjakan kasus dari daerah sekitar," terangnya yang menyebut ada delapan RS di Kota Jogja yang menjadi rawat inap bagi Covid-19.

Terpisah, Ketua BPD PHRI DIJ Deddy Pranowo Eryono mengatakan, baru wacana *lockdown* saja sudah merasakan dampaknya. Sebesar 30 persen reservasi di *cancel* atau dibatalkan, kebanyakan dari daerah Jatim, Jabar, dan Kaltim. "Sudah banyak yang menanyakan dan *cancel* atau menunda untuk resesvasinya," katanya.

Menurutnya, wacana itu justru

akan lebih memperburuk kondisi wilayah DIJ dari sektor ekonomi. Padahal telah disepakati bersama sebelumnya bahwa aspek kesehatan dan ekonomi berjalan beriringan lantaran pandemi ini belum tahu kapan akan berakhir.

"Wacana *lockdown* tidak akan efektif. Nanti keduanya, kesehatan dan ekonomi, akan ambruk bersama," ujar general manager Hotel Ruba Grha ini.

Sehingga, pihaknya tegas menolak apabila wacana *lockdown* DIJ diterapkan. Dan mengajak semua kalangan menerapkan proses dengan disiplin dan ketat. Jika sebagai jalan terakhir untuk diterapkan, maka dorongan harus ada kompensasi biaya hidup bagi pelaku industri pariwisata maupun karyawannya. Serta adanya potongan biaya operasional hotel dan restoran. "Seperti listrik, pajak air tanah dan PDAM yang sekarang naik-nai luar biasa," tambah Deddy. (wia/laz/fj)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. BPBD			
3. Dinas Pariwisata			

Yogyakarta, 13 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005